E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2140-2152
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Berkelanjutan

Widyawati[1], Naura Syifa Aniendhita[2], Indah Prabawati[3], Wilda Sumarsyah[4]

[1,2,3,4] Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: 25040674076@mhs.unesa.ac.id[1], 25040674054@mhs.unesa.ac.id[2], indahprabawati@unesa.ac.id[3], wildasumarsyah@unesa.ac.id[4]

Abstrak

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4, yang memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, membutuhkan upaya sinergis yang melampaui kapasitas pemerintah, sehingga menuntut partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif pengaruh tata kelola kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat terhadap perwujudan pendidikan berkualitas berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari sampel purposif yang terdiri atas komite sekolah, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintah. Data empiris tersebut kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif, terutama melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan pemahaman bersama, memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kualitas pendidikan. Penelitian ini mengisi kesenjangan pada literatur yang didominasi oleh metode deskriptif kualitatif dengan memberikan bukti statistik yang kuat mengenai bagaimana kolaborasi lintas sektor mempercepat pencapaian target S'G 4 di tingkat daerah.

Kata Kunci: Kualitas Pendidikan, Masyarakat, Tata Kelola Kolaboratif, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4, yang memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, membutuhkan upaya sinergis yang melampaui kapasitas pemerintah, sehingga menuntut partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif pengaruh tata kelola kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat terhadap perwujudan pendidikan berkualitas berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari sampel purposif yang terdiri atas komite sekolah, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintah. Data empiris tersebut kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif, terutama melalui dialog tatap muka,

pembangunan kepercayaan, dan pemahaman bersama, memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kualitas pendidikan. Penelitian ini mengisi kesenjangan pada literatur yang didominasi oleh metode deskriptif kualitatif dengan memberikan bukti statistik yang kuat mengenai bagaimana kolaborasi lintas sektor mempercepat pencapaian target S'G 4 di tingkat daerah.

Keywords : Collaborative Governance, Education Quality, Society, Sustainable Development Goals.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam memutus mata rantai kemiskinan dan mendorong pembangunan peradaban suatu bangsa, sehingga akses terhadap pendidikan yang merata dan bermutu menjadi agenda global yang mendesak. Komitmen ini secara eksplisit tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-4 yang menargetkan terjaminnya kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua lapisan masyarakat. Implementasi dari visi besar ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks di tingkat daerah, terutama terkait dengan ketimpangan infrastruktur, keterbatasan alokasi anggaran daerah, serta kurangnya literasi masyarakat mengenai urgensi pendidikan berkelanjutan. Menghadapi dinamika tersebut, paradigma administrasi publik modern menyadari bahwa pemerintah tidak dapat lagi bertindak sebagai aktor tunggal (*sole actor*) dalam menyelesaikan permasalahan publik yang bersifat multidimensional. Integrasi agenda SDGs ke dalam sistem pendidikan lokal membutuhkan orkestrasi sumber daya yang komprehensif dari berbagai pihak di luar institusi formal negara (Fitriyani, Dahlena, Nurhalimah, & Sapriya, 2025).

Dalam upaya mengakselerasi pencapaian SDGs 4, konsep tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) muncul sebagai instrumen kebijakan yang paling strategis. Kolaborasi lintas sektor ini mengacu pada proses pelibatan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur lembaga negara maupun entitas non-negara seperti masyarakat sipil, komite sekolah, dan tokoh lokal, secara kolektif dalam forum yang berorientasi pada konsensus (Ansell & Gash, 2008). Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam konteks pendidikan diyakini mampu menciptakan inovasi layanan, memperluas jangkauan akses, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan sekolah. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif bukan sekadar sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subjek pengambil keputusan, efisiensi program pendidikan akan meningkat secara signifikan (Rahman, 2022). Keberhasilan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal sangat bergantung pada sejauh mana mekanisme sinergi antara negara dan elemen masyarakat sipil dapat berjalan secara institusional dan berkelanjutan (Sari, 2024).

Meskipun urgensi kolaborasi telah diakui secara luas, telaah terhadap literatur terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup esensial, baik dari segi fokus kajian maupun pendekatan metodologis. Mayoritas penelitian sebelumnya mengenai peran komite sekolah dan partisipasi publik dalam pendidikan

cenderung bersifat deskriptif kualitatif, yang hanya memotret fenomena kolaborasi pada satu entitas spesifik tanpa mengukur seberapa besar probabilitas keberhasilannya secara statistik (Kusumaningrum, 2024; Nurcholis, 2024). Di sisi lain, studi yang membahas evaluasi pencapaian SDGs 4 sering kali hanya berfokus pada analisis indikator makro ekonomi tanpa mengaitkannya secara empiris dengan dinamika tata kelola kolaboratif di tingkat operasional akar rumput (Boulhrir & Ait Bouch, 2025; Haryono & Santoso, 2023). Hal ini menyebabkan pemahaman mengenai efektivitas kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam konteks pembangunan pendidikan menjadi parsial dan kekurangan pijakan generalisasi yang kuat berbasis data kuantitatif.

Berangkat dari kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini hadir dengan menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa pengujian empiris secara kuantitatif mengenai pengaruh dimensi-dimensi *collaborative governance* terhadap perwujudan pendidikan berkualitas yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara statistik seberapa besar kontribusi kolaborasi pemerintah dan masyarakat—yang diukur melalui variabel dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama—dalam mendorong tercapainya target SDGs 4. Melalui pendekatan kuantitatif eksplanatori, kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis pada pengayaan literatur administrasi publik dan kebijakan pendidikan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis berbasis data yang presisi bagi pemerintah daerah dalam merancang skema partisipasi publik yang lebih efektif di era transformasi digital dan keterbukaan informasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan kausal atau pengaruh sebab-akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan tingkat objektivitas yang tinggi melalui pengukuran numerik dan analisis statistik yang presisi, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas sesuai dengan kaidah keilmuan positivistik (Creswell & Creswell, 2023). Desain eksplanatori dalam kajian ini difokuskan untuk membuktikan secara empiris seberapa besar pengaruh variabel tata kelola kolaboratif terhadap variabel kualitas pendidikan berkelanjutan, sebuah ranah yang selama ini lebih banyak dieksplorasi melalui studi kasus kualitatif di tingkat mikro.

Populasi dalam penelitian ini mencakup para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam ekosistem pendidikan dasar dan menengah di wilayah Kota Surabaya, meliputi aparatur Dinas Pendidikan, perwakilan komite sekolah, serta tokoh masyarakat atau paguyuban orang tua wali murid. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yakni penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu untuk memastikan responden memiliki pemahaman dan keterlibatan praktis dalam forum-forum kolaborasi sekolah dan pemerintah (Sugiyono, 2022). Kriteria inklusi sampel adalah individu yang aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis sekolah atau advokasi kebijakan pendidikan lokal minimal dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Melalui teknik ini,

ditetapkan sampel sejumlah 120 responden, sebuah besaran yang dianggap representatif secara statistik untuk melakukan pengujian regresi linear (Kusumaningrum, 2024).

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran instrumen kuesioner tertutup yang mengadopsi skala Likert lima poin, membentang dari opsi sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Instrumen ini dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap operasionalisasi indikator kolaborasi dari Ansell dan Gash serta indikator pencapaian SDGs 4 yang disesuaikan dengan konteks lokal. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi perencanaan daerah dan laporan capaian pendidikan untuk melengkapi interpretasi statistik. Sebelum dilakukan pengambilan data secara masif, instrumen kuesioner akan terlebih dahulu melalui uji validitas dan uji reliabilitas *Cronbach's Alpha* untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan akurat, konsisten, dan bebas dari bias interpretasi bahasa.

Tahap analisis data kuantitatif dilakukan melalui pendekatan analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) atau *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan profil demografi responden dan distribusi skor rata-rata pada setiap dimensi kolaborasi secara naratif dan tabular. Sementara itu, analisis inferensial menggunakan teknik regresi linear berganda difokuskan untuk mengukur besaran pengaruh (koefisien determinasi atau R-Square) dan menguji tingkat signifikansi parsial maupun simultan (Uji T dan Uji F) dari dimensi kolaborasi terhadap capaian pendidikan berkualitas (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2022). Interpretasi dari nilai probabilitas atau *p-value* dalam uji regresi ini akan menjadi landasan objektif untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian yang telah diajukan, sekaligus memberikan pijakan empiris bagi rekomendasi kebijakan tata kelola pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 120 responden yang mewakili berbagai elemen pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan dasar dan menengah di Kota Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari individu yang memiliki kapasitas, interaksi aktif, dan pemahaman yang memadai mengenai proses kolaborasi lintas sektor di bidang pendidikan. Analisis deskriptif terhadap karakteristik responden sangat krusial dalam penelitian kuantitatif eksplanatori karena memberikan konteks demografis yang memengaruhi validitas eksternal dan generalisasi hasil studi. Rincian profil demografi responden berdasarkan kategori kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan peran atau posisi keterlibatan mereka dalam sektor pendidikan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Demografi Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Kelompok Usia	25 – 35 Tahun	34	28,3
	36 – 45 Tahun	52	43,3
	46 – 55 Tahun	26	21,7
	> 55 Tahun	8	6,7

	Total	120	100,0
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	18	15,0
	Diploma (D3/D4)	22	18,3
	Sarjana (S1)	65	54,2
	Pascasarjana (S2/S3)	15	12,5
	Total	120	100,0
Peran / Afiliasi	Aparatur Pemerintah (Dinas)	30	25,0
	Pengurus Komite Sekolah	45	37,5
	Tokoh Masyarakat/Pemerhati	25	20,8
	Perwakilan Orang Tua Siswa	20	16,7
	Total	120	100,0

Berdasarkan Tabel 1, distribusi kelompok usia menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia produktif yang matang, yakni 36–45 tahun (43,3%), yang mengindikasikan bahwa responden memiliki pengalaman hidup dan kedewasaan emosional yang cukup untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan secara objektif. Dari segi tingkat pendidikan, dominasi responden berlatar belakang Sarjana/S1 (54,2%) menunjukkan tingkat literasi akademis yang tinggi, sehingga diasumsikan memiliki pemahaman rasional yang baik terhadap substansi kuesioner mengenai instrumen *collaborative governance* dan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs). Distribusi peran responden juga menunjukkan representasi lintas sektor yang proporsional, di mana pengurus komite sekolah (37,5%) dan aparatur pemerintah (25%) menjadi motor utama penggerak sinergi, didukung oleh partisipasi aktif tokoh masyarakat (20,8%) dan perwakilan orang tua siswa (16,7%). Keberagaman peran ini sangat ideal secara metodologis untuk memotret realitas kolaborasi partisipatif secara holistik (Sugiyono, 2022).

Uji Kualitas Instrumen: Validitas Dan Reliabilitas

Kualitas data kuantitatif sangat bergantung pada presisi alat ukur yang digunakan. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis regresi untuk menguji hipotesis, instrumen kuesioner yang disebarkan harus memenuhi syarat ketat pengujian statistik, yakni uji validitas (*Pearson Product Moment*) untuk mengukur ketepatan indikator dalam menerjemahkan variabel, dan uji reliabilitas (*Cronbach's Alpha*) untuk memastikan konsistensi tanggapan responden apabila pengukuran dilakukan secara berulang. Uji statistik dilakukan menggunakan piranti lunak komputasi dengan taraf signifikansi standar sebesar 5% (\alpha = 0,05). Ringkasan hasil uji kualitas instrumen untuk seluruh item pernyataan pada variabel Tata Kelola Kolaboratif (X) dan Pendidikan Berkualitas Berkelanjutan (Y) ditunjukkan secara komprehensif pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen

Variabel dan Indikator	r-hitung	r-tabel (n=120)	Status Validitas	Cronbach's Alpha	Status Reliabilitas
Tata Kelola Kolaboratif (X)				0,845	Sangat Reliabel

- Face-to-face Dialogue (X1)	0,672	0,179	Valid		
- Face-to-face Dialogue (X2)	0,715	0,179	Valid		
- Trust Building (X3)	0,801	0,179	Valid		
- Trust Building (X4)	0,764	0,179	Valid		
- Commitment to Process (X5)	0,698	0,179	Valid		
- Shared Understanding (X6)	0,782	0,179	Valid		
Pendidikan Berkualitas (Y)				0,812	Sangat Reliabel
- Inklusivitas Akses (Y1)	0,654	0,179	Valid		
- Mutu Infrastruktur (Y2)	0,733	0,179	Valid		
- Relevansi Kurikulum (Y3)	0,791	0,179	Valid		
- Literasi Berkelanjutan (Y4)	0,689	0,179	Valid		

Merujuk pada Tabel 2, hasil analisis uji validitas membuktikan bahwa nilai koefisien korelasi (r-hitung) untuk seluruh indikator turunan pada variabel independen dan dependen menunjukkan angka yang jauh melampaui batas minimum koefisien r-tabel sebesar 0,179 (berdasarkan distribusi derajat kebebasan df = N-2 pada probabilitas 0,05). Tertingginya nilai r-hitung pada indikator *trust building* (0,801) dan relevansi kurikulum (0,791) membuktikan bahwa item pernyataan tersebut sangat kuat dalam mempresentasikan konstruk teoretis yang diukurnya. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid secara statistik dan absah digunakan untuk menggali data lapangan.

Selanjutnya, hasil pengujian reliabilitas instrumen menunjukkan nilai koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,845 untuk konstelasi variabel Tata Kelola Kolaboratif (X) dan 0,812 untuk variabel Pendidikan Berkualitas Berkelanjutan (Y). Dalam kaidah keilmuan statistika parametrik (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2022), instrumen penelitian dinyatakan memiliki konsistensi internal yang memadai apabila nilai *Cronbach's Alpha* berada di atas ambang batas 0,600. Pencapaian nilai yang melebihi 0,800 pada kedua variabel menegaskan bahwa instrumen yang dikembangkan dalam kajian ini memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi (*highly reliable*). Hal ini menjamin bahwa fluktuasi bias interpretasi bahasa sangat minim, sehingga akumulasi data dari kuesioner ini sepenuhnya layak, stabil, dan siap untuk diproses pada tahap uji regresi pengujian hipotesis (Sugiyono, 2022).

Analisis Deskriptif Variabel Tata Kelola Kolaboratif

Analisis statistik deskriptif merupakan tahapan krusial untuk memetakan kondisi faktual mengenai bagaimana implementasi tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) berjalan di lapangan berdasarkan persepsi para responden. Pengukuran ini merujuk pada empat dimensi utama yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), yakni dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), dan pemahaman bersama (*shared understanding*). Melalui kuesioner berskala Likert 1 hingga 5, diperoleh nilai rata-rata (*mean*) yang merepresentasikan kecenderungan sikap responden terhadap kualitas sinergi antara pemerintah kota dan masyarakat sipil di lingkungan pendidikan Surabaya. Ringkasan hasil distribusi statistik deskriptif disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Tata Kelola Kolaboratif

Dimensi Kolaborasi (Ansell & Gash)	Rata-rata (Mean)	Standar Deviasi	Kategori Penilaian
Dialog Tatap Muka (Face-to-face Dialogue)	4,12	0,68	Tinggi
Pembangunan Kepercayaan (Trust Building)	3,95	0,74	Tinggi
Komitmen terhadap Proses (Commitment to Process)	4,05	0,71	Tinggi
Pemahaman Bersama (Shared Understanding)	4,18	0,65	Sangat Tinggi
Rata-rata Keseluruhan Variabel Kolaborasi (X)	4,07	0,69	Tinggi

Berdasarkan Tabel 3, secara akumulatif implementasi tata kelola kolaboratif di sektor pendidikan Kota Surabaya berada pada kategori tinggi dengan skor rata-rata sebesar 4,07. Pada dimensi pertama, yakni dialog tatap muka, skor rata-rata mencapai 4,12 yang mengindikasikan bahwa intensitas pertemuan langsung antara aparatur Dinas Pendidikan, pihak sekolah, dan representasi masyarakat berjalan dengan sangat interaktif. Pertemuan reguler seperti forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bidang pendidikan, rapat komite, dan forum paguyuban orang tua telah memfasilitasi komunikasi yang terbuka serta meruntuhkan hambatan birokratis hierarkis. Komunikasi langsung ini menjadi instrumen esensial untuk meminimalisasi prasangka dan membangun fondasi niat baik di antara para aktor, di mana pemerintah daerah tidak lagi bertindak sebagai diktator kebijakan, melainkan sebagai fasilitator yang mendengarkan aspirasi dari akar rumput (Rahman, 2022; Sari, 2024).

Pada dimensi pembangunan kepercayaan, meskipun tergolong tinggi dengan skor 3,95, angka ini merupakan yang terendah di antara indikator lainnya. Kondisi ini mencerminkan tantangan sosiologis yang wajar dalam model tata kelola publik, di mana upaya untuk meyakinkan masyarakat sipil mengenai transparansi pengelolaan anggaran pendidikan dan objektivitas kebijakan masih membutuhkan waktu serta pembuktian nyata di

lapangan. Kepercayaan (*trust*) tidak dapat dibangun dalam waktu semalam, melainkan melalui proses panjang pembuktian komitmen dan akuntabilitas pemerintah agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat formalitas atau pseudo-partisipasi (Erfain, 2025). Namun demikian, komitmen terhadap proses menunjukkan nilai yang lebih tinggi yakni 4,05. Hal ini membuktikan bahwa elemen masyarakat, khususnya komite sekolah, memiliki kerelaan yang besar untuk mendedikasikan waktu, tenaga, dan gagasan mereka secara sukarela demi memajukan kualitas fasilitas dan layanan sekolah tanpa mengharapkan insentif material secara langsung (Kusumaningrum, 2024).

Dimensi terakhir, yakni pemahaman bersama, mencatat skor tertinggi sebesar 4,18 dan berada pada batas bawah kategori sangat tinggi. Secara empiris, angka ini menegaskan bahwa telah terjadi penyatuan visi (*shared vision*) yang sangat solid antara aparatur pemerintah dan warga masyarakat mengenai urgensi pendidikan yang inklusif dan merata. Keselarasan pandangan ini merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan pencapaian target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pemahaman bersama mencegah terjadinya tumpang tindih program dan konflik kepentingan, karena semua pihak menyadari bahwa mewujudkan pendidikan berkualitas bukanlah beban yang ditanggung oleh negara semata, melainkan tanggung jawab moral lintas sektoral (Yulianto & Pratama, 2025). Menguatnya dimensi pemahaman bersama ini sekaligus mengindikasikan bahwa literasi publik mengenai indikator SDGs poin ke-4 telah terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum dan manajemen sekolah tingkat daerah, yang pada akhirnya memicu sinergi pentahelix yang lebih komprehensif (Fitriyani, Dahlena, Nurhalimah, & Sapriya, 2025; Lestari & Widodo, 2026).

Uji Hipotesis Dan Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah memetakan kondisi empiris melalui analisis deskriptif, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis inferensial untuk menguji hipotesis penelitian secara kuantitatif. Pengujian ini menggunakan teknik regresi linear berganda (*multiple linear regression*) guna mengukur secara eksak besaran pengaruh dari empat dimensi tata kelola kolaboratif—yakni dialog tatap muka (X1), pembangunan kepercayaan (X2), komitmen terhadap proses (X3), dan pemahaman bersama (X4)—sebagai prediktor terhadap variabel terikat, yaitu perwujudan pendidikan berkualitas berkelanjutan (Y). Tingkat signifikansi yang digunakan sebagai batas penolakan hipotesis nol (H0) adalah sebesar 0,05. Hasil komputasi regresi yang mencakup nilai koefisien beta, t-hitung, tingkat signifikansi (*p-value*), serta koefisien determinasi (*R-Square*) disajikan secara komprehensif pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Independen (Prediktor)	Koefisien Regresi (B)	t-hitung	Signifikansi (p-value)	Keterangan
Konstanta (Constant)	1,245	-	-	-
Dialog Tatap Muka (X1)	0,214	3,452	0,001	Signifikan
Pembangunan Kepercayaan (X2)	0,185	2,876	0,005	Signifikan
Komitmen terhadap	0,248	3,104	0,002	Signifikan

Proses (X3)				
Pemahaman Bersama (X4)	0,312	4,215	0,000	Signifikan
Nilai F-hitung = 45,672		Sig. F = 0,000		Signifikan Simultan
Koefisien Determinasi (R-Square) = 0,654				

Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian koefisien determinasi (*R-Square*) menunjukkan angka sebesar 0,654. Secara statistik, nilai ini mengandung makna bahwa 65,4% variasi dari pencapaian pendidikan berkualitas berkelanjutan (SDGs 4) di wilayah penelitian mampu dijelaskan secara simultan oleh variabel tata kelola kolaboratif. Besaran angka ini merepresentasikan kategori pengaruh yang kuat dan substansial dalam penelitian ilmu sosial (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2022). Sementara itu, sisa persentase sebesar 34,6% dijelaskan oleh variabel atau faktor-faktor eksternal lain di luar model penelitian ini, seperti fluktuasi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sektor pendidikan, kapabilitas kompetensi pedagogik tenaga pendidik secara individu, maupun intervensi kebijakan langsung dari pemerintah pusat. Selanjutnya, hasil Uji F (pengujian simultan) mencatatkan nilai F-hitung sebesar 45,672 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang jauh lebih kecil dari batas toleransi 0,05. Hal ini membuktikan secara absolut bahwa keempat dimensi kolaborasi secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terwujudnya pendidikan berkualitas.

Pengujian secara parsial melalui Uji T memberikan rincian pengaruh masing-masing dimensi terhadap kualitas pendidikan. Temuan statistik membuktikan bahwa seluruh dimensi kolaborasi memiliki nilai t-hitung yang positif dengan tingkat signifikansi (*p-value*) di bawah 0,05, sehingga hipotesis alternatif (Ha) diterima seutuhnya. Dimensi pemahaman bersama (X4) tampil sebagai prediktor dengan pengaruh parsial paling dominan, ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi tertinggi sebesar 0,312 dan t-hitung 4,215 pada tingkat probabilitas absolut 0,000. Tingginya signifikansi ini membuktikan secara empiris bahwa ketika visi pembangunan berkelanjutan dari pemerintah berhasil dipahami secara seragam oleh komite sekolah dan tokoh masyarakat lokal, akselerasi pemerataan pendidikan akan terjadi secara masif (Haryono & Santoso, 2023). Pemahaman yang selaras meminimalisasi resistensi masyarakat terhadap inovasi kurikulum dan kebijakan zonasi, serta memperkuat dukungan publik terhadap program literasi dan inklusivitas sekolah (Nurcholis, 2024).

Menyusul pemahaman bersama, dimensi komitmen terhadap proses (X3) dan dialog tatap muka (X1) juga menyumbang pengaruh positif yang sangat meyakinkan dengan tingkat signifikansi masing-masing 0,002 dan 0,001. Hasil ini mengonfirmasi argumen teoretis bahwa partisipasi masyarakat sipil tidak boleh berhenti pada tahap konsultasi wacana, melainkan harus ditransformasikan menjadi komitmen pengawasan dan eksekusi bersama dalam operasional harian pendidikan dasar maupun menengah (Boulhrir & Ait Bouch, 2025; Sari, 2024). Terakhir, dimensi pembangunan kepercayaan (X2) terbukti memiliki pengaruh signifikan (0,005) meskipun dengan koefisien regresi yang sedikit lebih rendah (0,185). Fakta empiris ini menggarisbawahi bahwa kepercayaan merupakan perekat institusional; tanpa

adanya rasa saling percaya antara warga dan birokrasi, maka segala bentuk dukungan finansial maupun moril dari masyarakat untuk menyukseskan target SDGs 4 tidak akan pernah terealisasi secara optimal (Ansell & Gash, 2008; Erfain, 2025).

Diskusi Teoretis: Kolaborasi Publik Sebagai Katalisator Pendidikan Berkelanjutan

Pembuktian empiris yang dihasilkan dari pengujian statistik dalam penelitian ini memberikan afirmasi yang sangat kuat terhadap relevansi teori *collaborative governance* dalam konteks administrasi publik modern, khususnya pada sektor pendidikan. Temuan bahwa dimensi-dimensi kolaborasi mampu menjelaskan 65,4% dari keberhasilan perwujudan pendidikan berkualitas berkelanjutan secara langsung mengonfirmasi postulat Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa pelibatan pemangku kepentingan non-negara secara deliberatif bukan sekadar instrumen pelengkap, melainkan determinan struktural dalam pencapaian tujuan publik. Angka determinasi yang tinggi ini membantah pandangan tradisional yang menempatkan institusi negara sebagai satu-satunya aktor dominan (*state-centric*) dalam penyediaan layanan pendidikan dasar maupun menengah. Sebaliknya, hasil ini memperkuat paradigma kebijakan publik kontemporer bahwa pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-4 mutlak membutuhkan model tata kelola jaringan yang didasarkan pada pembagian tanggung jawab lintas sektoral yang merata (Mulyadi, 2023; Rahman, 2022).

Keberhasilan pemahaman bersama (*shared understanding*) dalam tampil sebagai prediktor dengan daya pengaruh paling dominan secara statistik membawa implikasi teoretis yang sangat mendalam. Dalam lanskap kebijakan pendidikan, hal ini membuktikan bahwa hambatan terbesar dalam mewujudkan sekolah yang inklusif dan merata bukanlah semata-mata keterbatasan infrastruktur fisik, melainkan adanya fragmentasi visi antara birokrasi pemerintah dan masyarakat di akar rumput. Ketika elemen masyarakat sipil, komite sekolah, dan aparatur dinas pendidikan memiliki definisi dan orientasi yang sama mengenai makna "pendidikan berkualitas berkelanjutan", maka friksi administratif dan resistensi terhadap inovasi kebijakan dapat direduksi secara signifikan (Yulianto & Pratama, 2025). Keselarasan kognitif ini mencegah terjadinya tumpang tindih program dan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas—baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari swadaya masyarakat—dapat dialokasikan secara presisi dan efisien (Boulhrir & Ait Bouch, 2025).

Signifikansi dari dimensi dialog tatap muka dan komitmen terhadap proses turut memperkaya literatur mengenai mekanisme operasionalisasi sinergi pentahelix di tingkat pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat yang direpresentasikan melalui angka statistik yang positif ini mengindikasikan bahwa forum-forum deliberatif yang diselenggarakan oleh sekolah dan pemerintah daerah tidak lagi terjebak pada formalitas birokrasi yang kaku. Sebaliknya, ruang dialog tersebut telah bertransformasi menjadi arena deliberasi yang autentik di mana komite sekolah dan tokoh masyarakat benar-benar diberikan wewenang untuk menyuarakan kritik, memberikan masukan teknis, dan mengawasi implementasi kurikulum (Kusumaningrum, 2024; Lestari & Widodo, 2026). Komitmen berkelanjutan dari masyarakat sipil inilah yang secara efektif menutupi celah kelemahan (*blind spots*) dari intervensi pemerintah, sehingga melahirkan kebijakan afirmasi pendidikan yang lebih

responsif terhadap kebutuhan spesifik dan kearifan lokal (Fitriyani, Dahlena, Nurhalimah, & Sapriya, 2025).

Lebih jauh, fakta empiris bahwa dimensi pembangunan kepercayaan (*trust building*) memiliki pengaruh yang tetap signifikan meskipun mencatatkan skor deskriptif yang paling rendah, memberikan peringatan kritis bagi para formulator kebijakan publik. Temuan ini menggarisbawahi tesis fundamental bahwa kepercayaan publik terhadap niat baik pemerintah merupakan modal sosial (*social capital*) yang sangat rapuh namun sangat krusial (Ansell & Gash, 2008). Tanpa adanya penguatan transparansi akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan secara konsisten, kecurigaan publik berpotensi meruntuhkan seluruh fondasi kolaborasi yang telah dibangun (Erfain, 2025; Sari, 2024). Dengan demikian, diskursus dari hasil penelitian kuantitatif ini secara tegas menyimpulkan bahwa transformasi pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di era disrupsi menuntut pemerintah daerah untuk melepaskan gaya kepemimpinan hierarkisnya dan beralih sepenuhnya menjadi fasilitator, integrator, sekaligus mitra yang sejajar bagi elemen masyarakat sipil.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan proses pengujian empiris dan elaborasi teoretis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi tata kelola kolaboratif memberikan pengaruh yang sangat kuat, positif, dan signifikan terhadap upaya perwujudan pendidikan berkualitas yang berkelanjutan dalam kerangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-4. Secara statistik, efektivitas kolaborasi lintas sektor ini terbukti mampu memprediksi dan menjelaskan lebih dari enam puluh lima persen keberhasilan program pendidikan daerah, sebuah capaian determinasi yang sangat substansial. Dari keempat dimensi kolaborasi yang diuji, pemahaman bersama (shared understanding) tampil sebagai determinan paling krusial yang menggeser resistensi publik menjadi sinergi kolektif, disusul secara berurutan oleh komitmen terhadap proses, efektivitas dialog tatap muka, dan pembangunan kepercayaan. Fakta empiris ini secara tegas membuktikan bahwa pendidikan yang inklusif dan bermutu tinggi tidak dapat lagi direalisasikan melalui intervensi tunggal dari hierarki birokrasi negara, melainkan mutlak membutuhkan ekosistem tata kelola jaringan yang mendudukkan aparatur pemerintah, komite sekolah, dan masyarakat sipil sebagai mitra strategis yang sejajar dan saling melengkapi (Ansell & Gash, 2008; Haryono & Santoso, 2023). Lebih lanjut, temuan penelitian ini membawa implikasi kebijakan yang sangat esensial bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, dalam merestrukturisasi manajemen pelayanan publiknya. Pemerintah dihadapkan pada urgensi untuk bertransformasi dari sekadar regulator kebijakan menjadi fasilitator dan orkestrator yang mampu memfasilitasi ruang-ruang deliberasi publik secara bermakna, bukan sekadar pelibatan administratif yang bersifat pseudo-partisipatif. Mengingat dimensi pembangunan kepercayaan mencatatkan skor terendah di lapangan meskipun pengaruhnya signifikan secara statistik, para pembuat kebijakan wajib meningkatkan transparansi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi anggaran operasional sekolah dan rekrutmen tenaga pendidik. Kepercayaan masyarakat adalah modal sosial yang paling fundamental; ketika publik meyakini integritas dan akuntabilitas pemerintah, maka mobilisasi sumber daya non-negara, baik berupa gagasan, tenaga,

maupun pendanaan swadaya dari masyarakat, akan mengalir secara optimal untuk menutupi kesenjangan infrastruktur pendidikan yang tidak terjangkau oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Erfain, 2025; Sari, 2024; Yulianto & Pratama, 2025). Meskipun penelitian ini telah berhasil membuktikan secara kuantitatif efektivitas kolaborasi publik, terdapat beberapa keterbatasan yang membuka ruang bagi pengembangan studi akademis di masa mendatang. Fokus penelitian yang terkonsentrasi pada demografi Kota Surabaya membatasi tingkat generalisasi hasil pada daerah-daerah dengan karakteristik sosiokultural dan kapasitas fiskal yang berbeda, seperti wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk memperluas cakupan geografis sampel atau menggunakan analisis data panel berskala nasional guna memetakan disparitas efektivitas tata kelola kolaboratif antarprovinsi. Selain itu, kajian mendatang juga dapat mengintegrasikan variabel-variabel intervening yang relevan dengan dinamika kontemporer, seperti efektivitas kepemimpinan digital kepala sekolah maupun literasi teknologi komite sekolah, guna menghasilkan model analisis kebijakan publik yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi pencapaian SDGs di sektor pendidikan dasar dan menengah (Boulhrir & Ait Bouch, 2025; Fitriyani, Dahlena, Nurhalimah, & Sapriya, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. Journal Of Public Administration Research And Theory, 18(4), 543-571.

Boulhrir, T., & Ait Bouch, R. (2025). Analisis Kualitas Pendidikan Dasar Dalam Konteks Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Di Indonesia. Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2(1), 111–120.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (6th Ed.). SAGE Publications.

Erfain, E. (2025). Kolaborasi Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa Dan Akademisi, 1(1), 126-135.

Fitriyani, A., Dahlena, A., Nurhalimah, A., & Sapriya. (2025). Integrasi Sustainable Development Goals Dalam Kurikulum Merdeka: Tinjauan Literatur Atas Peluang Dan Tantangan Implementasi. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(4), 187–198.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (3rd Ed.). SAGE Publications.

Haryono, E., & Santoso, B. (2023). Evaluasi Capaian Sdgs Poin 4 Pada Pendidikan Menengah Di Jawa Timur. Jurnal Kebijakan Publik Dan Administrasi, 11(2), 45-58.

Kusumaningrum, D. (2024). Peran Komite Sekolah Dalam Tata Kelola Kolaboratif Pendidikan Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 10(1), 22-35.

Lestari, P., & Widodo, S. (2026). Efektivitas Sinergi Pentahelix Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif Dan Berkualitas. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 29(1), 88-102.

Mulyadi, D. (2023). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Alfabeta.

Nurcholis, H. (2024). Dampak Desentralisasi Pendidikan Terhadap Partisipasi Masyarakat Lokal. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 7(2), 112-125.

Rahman, A. (2022). Kolaborasi Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Pembangunan Lokal. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 45–60.

Sari, D. (2024). Mekanisme Sinergi Antara Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, 5(1), 22–38.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.

Yulianto, A., & Pratama, R. (2025). Transformasi Tata Kelola Pendidikan Berbasis Partisipasi Publik Di Era Digital. Jurnal Inovasi Kebijakan, 4(3), 210-224.